

BAGIAN KETIGA
MEREPOSISI
UJIAN NASIONAL

MEREPOSISI UJIAN NASIONAL

Dalam setiap hajatan akbar ujian nasional (UN), baik untuk SMA/SMK/MA, SMP/MTs, maupun SD/MI, hampir selalu diwarnai isu kebocoran soal dan beredarnya paket kunci jawaban. Selain itu, UN juga diwarnai kejadian yang menunjukkan ketidakjujuran (*dishonesty*). Budaya contek yang melibatkan peserta didik, guru, dan pengawas masih umum terjadi.

Banyak pihak mengatakan bahwa ketidakjujuran ini merupakan akibat dari tekanan yang luar biasa dari UN. Tekanan itu misalnya berupa tuntutan dari orang tua dan sekolah untuk lulus. Orang tua jelas berkepentingan dengan kelulusan anaknya untuk melanjutkan studi. Sementara sekolah berkepentingan dengan tingkat kelulusan peserta didik karena berkaitan dengan citra lembaga.

Di luar kepentingan pendidikan, UN ternyata juga menjadi perhatian pejabat publik seperti menteri, gubernur, kepala dinas pendidikan, dan bupati/walikota. Mereka menaruh perhatian karena keberhasilan UN dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan citranya sebagai pejabat publik. Karena itu, banyak kepala daerah yang memberikan target kepada kepala dinas pendidikan untuk meningkatkan kelulusan peserta didik.

Kepala dinas pendidikan meneruskan perintah atasannya dengan mengundang kepala-kepala sekolah. Tujuannya jelas, agar kepala sekolah menyukseskan UN. Karena diperintahkan kepala dinas pendidikan, kepala sekolah pun tidak mau kalah. Mereka kemudian membentuk tim sukses yang melibatkan guru-guru di sekolah. Strategi menyukseskan UN pun diatur, mulai dari cara-cara yang normal hingga yang tak normal.

Cara yang normal tentu dengan melakukan proses belajar-mengajar yang baik dan memperbanyak *try out* soal-soal UN. Biasanya setelah semua ikhtiar dilakukan, para guru pun mengajak peserta didik untuk memperkuat kondisi spiritualnya. Karena itu, jangan heran jika saat menjelang UN selalu terjadi peningkatan religiusitas peserta didik. Budaya doa bersama pun menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan sekolah.

Sementara cara-cara yang tidak normal dilakukan guru seperti mengajak peserta didik ke tempat-tempat yang dianggap keramat/suci untuk bermohon sukses UN. Bahkan ada juga kejadian peserta didik diminta untuk meminum air atau membawa pensil yang telah dibacakan doa-doa tertentu. Itu semua dilakukan untuk memperkuat sugesti peserta didik. Beberapa kejadian tersebut sekadar menunjukkan betapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan UN.

Ironinya, fenomena ini terjadi setiap menjelang pelaksanaan UN. Ini belum termasuk anggaran ratusan miliar rupiah yang dihabiskan untuk menyelenggarakan UN. Pertanyaannya, apakah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan terus melaksanakan UN? Padahal UN telah banyak menimbulkan ketidakjujuran, tekanan psikologis, isu kebocoran soal, serta korban mental dan fisik yang dialami peserta didik. Bukankah Kemendikbud selalu me-

nekankan pentingnya pendidikan karakter? Pertanyaannya, apa relevansi pendidikan karakter dengan UN? Rasanya belum ada teori yang dapat menjelaskan secara memuaskan keterkaitan pendidikan karakter dengan kebijakan UN.

Perlu Reposisi

Harus diakui, UN merupakan produk politik. Itu karena kebijakan UN merupakan kesepakatan eksekutif dan legislatif sehingga harus dilaksanakan dengan alokasi biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasan ini juga yang selalu dikemukakan pemerintah saat merespons tuntutan penghapusan UN. Karena merupakan produk politik, untuk menghapuskan UN, pasti akan memakan waktu yang lama.

Pasti diperlukan lobi-lobi politik untuk menghapuskan kegiatan yang menyerap anggaran ratusan miliar rupiah tersebut. Pihak-pihak yang selama ini diuntungkan secara ekonomis pasti akan merasa sangat kehilangan jika UN dihapuskan. Karena itu, langkah yang paling realistis adalah mereposisi fungsi UN dengan cara tidak menjadikan UN sebagai komponen kelulusan peserta didik.

Sejauh ini pemerintah menentukan kelulusan peserta didik ditentukan oleh komponen ujian sekolah (40 persen) dan UN (60 persen). Pemerintah pun selalu beralasan bahwa UN bukan satu-satunya komponen untuk kelulusan peserta didik. Pemerintah telah memberikan alokasi 40 persen pada sekolah untuk menentukan kelulusan peserta didik. Secara normatif yang dikemukakan pemerintah ini benar adanya. Tetapi, fakta menunjukkan bahwa perhatian sekolah pada UN masih sangat dominan. Jika UN tidak dijadikan komponen kelulusan, secara otomatis kelulusan peserta didik menjadi wewenang guru.

Untuk menilai kelulusan peserta didik, guru sesungguhnya telah melakukan dengan cara penilaian yang otentik

tik (*authentic assessment*) dalam bentuk ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan, dan mengobservasi perilaku peserta didik setiap hari. Dari sudut pandang teori evaluasi pendidikan dapat dikatakan bahwa cara ini jauh lebih dapat dipercaya daripada hasil UN. Fungsi UN selanjutnya dapat dikembalikan pada tujuan awalnya, yaitu pemetaan mutu pendidikan.

Berdasar hasil UN, pemerintah dapat memetakan mutu pendidikan, memberi penghargaan sekolah yang berhasil, dan secara intensif membina sekolah yang kurang berhasil. Komponen terpenting yang harus dibina adalah guru.

Ini karena guru merupakan ujung tombak pendidikan. Rasanya akan jauh lebih baik kalau anggaran UN dimak-simalkan untuk meningkatkan mutu guru. Dengan guru berkualitas, pendidikan nasional pasti akan diperhitungkan di level dunia.

MENGGAGAS UN YANG BERKEADILAN

Kritik berbagai elemen masyarakat terhadap pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tampaknya mulai direspon positif oleh pemerintah. Melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), pemerintah kini terus merancang formulasi yang lebih adil untuk menentukan kelulusan peserta didik dalam UN 2011. Formulasi baru ini dimaksudkan untuk mengakomodasi seluruh capaian (*achievement*) peserta didik selama mengenyam pendidikan di sekolah.

Dikatakan oleh Mendiknas, M. Nuh, bahwa formulasi ini menekankan pada dua prinsip. *Pertama*, penentuan kelulusan didasarkan pada penilaian yang menyeluruh; mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Prinsip ini menekankan bahwa mekanisme penentuan kelulusan peserta didik harus didasarkan pada hasil evaluasi pembelajaran peserta didik mulai kelas 1 hingga 3. Dengan demikian kelulusan peserta didik akan ditentukan berdasarkan nilai rata-rata dari UN, rapor, dan ujian sekolah. *Kedua*, berprinsip pada *continuity* dengan harapan agar hasil evaluasi model terbaru ini dapat dijadikan dasar bagi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Formulasi yang diajukan Kemendiknas tersebut diharapkan dapat mereduksi ketentuan yang lama. Pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya selalu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam pasal 17 ayat 1, dikatakan bahwa ada empat persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik untuk dinyatakan lulus: lulus seluruh mata pelajaran, berakhlak baik, lulus ujian sekolah, dan lulus UN.

Tetapi, sangat disayangkan empat komponen itu tidak digunakan sebagaimana mestinya, karena tetap mengedepankan hasil akhir UN. Akibatnya, UN menjadi beban bagi peserta didik, guru, dan orang tua. Bermula dari persepsi yang salah terhadap UN inilah banyak sekolah berpikiran untuk melakukan apa pun asal peserta didik lulus. Dari sinilah praktik ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) mewabah. Dalam situasi seperti ini, maka tidak heran jika banyak pihak meragukan kredibilitas hasil UN. Kalangan perguruan tinggi melalui forum rektor pun meragukan hasil UN, sehingga menolak wacana integrasi hasil UN dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Pertanyaannya, apakah dengan formulasi baru ini dengan sendirinya dapat mengurangi ketidakjujuran di sekolah? Pertanyaan ini layak diajukan karena mekanisme penentuan kelulusan dengan dasar akumulasi nilai rata-rata UN, rapor, dan ujian sekolah, tidak menjamin sekolah berlaku jujur. Praktik yang sangat mungkin terjadi adalah sekolah memberi nilai tinggi pada rapor dan ujian sekolah untuk mengantisipasi jebloknya nilai UN. Tentu saja praktik ini dapat diminimalkan jika pemerintah menetapkan pembobotan nilai. Dengan pembobotan nilai UN, rapor, dan ujian sekolah, maka penentuan kelulusan peserta didik terasa lebih adil.

Jujur harus diakui, bahwa selama ini ada yang salah mempersepsi penolakan sebagian masyarakat terhadap

UN. Sebenarnya, yang ditolak masyarakat bukan penyelenggaraan UN. Sebab, UN tetap penting sebagai bagian dari sistem evaluasi untuk menilai mutu pendidikan. Dalam hal ini UN dapat digunakan sebagai salah satu alat mengevaluasi secara eksternal terhadap proses belajar mengajar oleh satuan pendidikan.

Yang menjadi persoalan adalah ketika UN dijadikan sebagai standar kelulusan peserta didik. Apalagi peserta didik diharuskan dapat melampaui standar nilai minimal untuk mata pelajaran yang di-UN-kan. Dalam situasi seperti ini maka peserta didik dan guru akan termotivasi melakukan apa saja agar dapat melewati nilai rata-rata minimal. Pemerintah juga berdalih bahwa tujuan penyelenggaraan UN adalah untuk memetakan mutu pendidikan. Argumentasi ini pun kurang relevan sebab seharusnya bukan peserta didik yang menjadi sasaran penilaian. Seharusnya yang menjadi sasaran penilaian mutu adalah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan.

Agar UN dapat dijalankan dengan penuh keadilan maka pemerintah harus segera merumuskan pembobotan untuk nilai UN, rapor, dan ujian sekolah. Pembobotan ini penting karena dapat dijadikan acuan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Langkah ini penting agar UN tidak dipandang segalanya. Dengan memberikan bobot dan persentasi pada setiap kriteria kelulusan, maka akan terbangun kesadaran bahwa nasib peserta didik tidak hanya ditentukan dalam beberapa hari. Kelulusan peserta didik juga tidak hanya ditentukan oleh mata pelajaran tertentu. Bahkan dengan mekanisme pembobotan ini sekolah memiliki landasan yuridis untuk tidak meluluskan peserta didik jika melakukan tindakan yang melanggar peraturan sekolah dan berperilaku asusila.

Kesediaan pemerintah untuk memperbaiki pelaksanaan UN harus diapresiasi. Sebab, berdasarkan pengalaman pelaksanaan UN tahun-tahun sebelumnya dapat dikatakan bahwa ternyata ada begitu banyak kepentingan di luar pendidikan yang turut bermain. Pejabat publik mulai presiden, menteri, gubernur, hingga bupati/walikota sangat berkepentingan menyukseskan kelulusan peserta didik untuk meningkatkan citra politik dirinya. Seorang kepala dinas pendidikan pun berusaha maksimal untuk menyukseskan UN karena dapat menjadi garansi bagi jabatannya. Bahkan, kepentingan ekonomi pun turut mewarnai penyelenggaraan UN karena rutinitas ini berkaitan dengan anggaran ratusan milyar.

Agaknya, ragam faktor ini menyebabkan para Mendiknas terdahulu mengalami kesulitan jika harus mereformasi total penyelenggaraan UN. Kini, kita layak berharap pada Mendiknas M. Nuh untuk mulai melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mendiknas harus diyakinkan bahwa penyelenggaraan UN dengan model yang dijalankan selama ini banyak melahirkan ketidakjujuran. Penyelenggaraan UN juga sangat bertentangan dengan keinginan melahirkan anak bangsa yang berkarakter kuat dan berdaya saing tinggi.

Disamping itu, para guru juga harus diyakinkan bahwa sepanjang pembelajaran telah dijalankan dengan baik dan benar, maka tidak ada yang perlu ditakuti. Oleh karena itu yang terpenting dilakukan sekolah adalah memberikan dorongan pada peserta didik untuk berbesar hati (*encouragment*). Dengan cara ini peserta didik dapat menghadapi UN layaknya ujian sekolah. Peserta didik juga harus didorong untuk menjalani UN berdasar pada kemampuan diri sendiri.

PRESTASI YES, JUJUR HARUS

Jadwal pelaksanaan ujian nasional (UN) 2012 telah diluncurkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Karena itu jangan heran jika pembelajaran di sekolah saat ini lebih banyak didominasi latihan mengerjakan soal-soal ujian. Dampaknya, guru mata pelajaran non-UN pun harus merelakan jika jam mengajarnya dikurangi. Semua ini dilakukan dengan harapan agar angka kelulusan peserta didik meningkat.

Harus diakui, saat menghadapi UN pihak yang paling sibuk adalah guru, apalagi guru kelas akhir. Pandangan yang menempatkan guru sebagai faktor utama kesuksesan peserta didik saat UN tentu sangat beralasan. Meski demikian, sesungguhnya ada faktor lain yang juga sangat berpengaruh pada kesuksesan peserta didik, yaitu dukungan orang tua. Faktor dukungan orang tua ini sangat berarti untuk membesarkan hati (*encouragement*) peserta didik agar menjalani UN dengan tenang. Orang tua dapat mendorong anaknya untuk meraih prestasi setinggi mungkin. Tetapi, yang tidak boleh dilupakan adalah pesan agar anaknya tetap menjunjung nilai-nilai kejujuran.

Faktor yang juga turut menambah beban saat pelaksanaan UN adalah tekanan pejabat publik. Pejabat terkait seperti menteri dan kepala dinas pendidikan mulai tingkat provinsi hingga

kabupaten/kota biasanya ikut mamatok target angka kelulusan. Bahkan pejabat publik sekelas presiden, gubernur, bupati, dan walikota pun turut berkepentingan dengan tingkat kelulusan untuk membangun citra kepemimpinannya. Hanya saja, kebijakan kepala daerah seringkali kurang menunjukkan keberpihakan pada peningkatan mutu pendidikan. Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan mutu guru. Pertanyaannya, bagaimana kita mau mewujudkan pendidikan yang unggul jika mutu guru kurang diperhatikan?

Ketakutan guru terhadap UN seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab, jika guru telah melakukan proses belajar dan mengajar dengan baik maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dapat dikatakan bahwa guru yang menempatkan UN sebagai beban adalah mereka yang tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan pembelajaran. Mereka inilah yang tidak memiliki rasa percaya diri sehingga mudah tergoda untuk berperilaku tidak jujur.

Perilaku tidak jujur itu dilakukan karena guru seringkali tidak dapat menerima kenyataan jika ada banyak peserta didiknya yang memiliki nilai jeblok. Pertimbangan lain yang juga penting dikemukakan adalah berkaitan dengan citra sekolah jika hasil ujian peserta didik tidak memuaskan. Dalam pikiran guru dan pimpinan sekolah, citra sekolah salah satunya dapat dilihat dari keberhasilannya dalam meluluskan peserta didik. Dalam kaitan ini persentasi kelulusan peserta didik dapat menjadi nilai lebih sekolah untuk meyakinkan pada *stakeholders*-nya.

UN 2012 harus disongsong dengan penuh optimisme. Semua pihak yang berkepentingan dengan UN harus diajak untuk berikrar; prestasi yes, jujur harus. Ikrar ini perlu dikedepankan agar UN berlangsung jujur dan kredibel. Hal ini penting karena persoalan kejujuran saat UN dari tahun ke tahun selalu men-

jadi perhatian semua pihak. Sekedar mengingatkan, diantara kasus yang menunjukkan ketidakjujuran pada pelaksanaan UN 2011 adalah contek massal di SD Negeri Gadel, Surabaya. Peristiwa ini hanya contoh dari sekian banyak kasus ketidakjujuran (*dishonesty*) yang melibatkan guru dan peserta didik saat ujian. Dikatakan contoh karena kasus ini layaknya fenomena gunung es; kelihatan sedikit tetapi faktanya sungguh sangat banyak.

Beberapa kebijakan sesungguhnya telah ditempuh pemerintah untuk mengurangi angka ketidakjujuran. Salah satunya adalah mekanisme penentuan kelulusan peserta didik yang dihitung berdasarkan pembobotan; UN (60 persen) dan ujian sekolah (40 persen). Ini berarti UN seharusnya dipahami bukan satu-satunya penentu kelulusan. Sebab, guru di sekolah pun memiliki porsi yang cukup untuk menentukan kelulusan peserta didiknya. Kebijakan lain yang patut dicatat adalah pembagian soal UN menjadi lima paket. Variasi soal ini diharapkan dapat mengurangi perilaku contek-menyontek saat UN. Dua kebijakan ini tetap dipertahankan untuk mewujudkan UN yang jujur dan kredibel.

Dalam rangka mewujudkan UN yang jujur dan kredibel maka dibutuhkan komitmen semua pihak untuk menjunjung nilai-nilai kejujuran. Semua pihak mulai pejabat publik, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua, harus diingatkan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Karena itulah anak-anak kita harus didorong untuk meraih prestasi dan berperilaku jujur saat menjalani UN.

RAPOR KEJUJURAN UN JATIM

Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional telah mempublikasi evaluasi tingkat kejujuran sekolah dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2008/2009. Dari 33 provinsi yang disurvei ternyata hanya ditemukan satu provinsi yang memiliki tingkat kejujuran di atas 50 persen. Provinsi tersebut adalah Yogyakarta. Di provinsi ini tingkat kejujuran sekolah mencapai 70,24 persen. Sementara di 32 provinsi yang lain tingkat kejujurannya berada jauh di bawah 50 persen. Bahkan untuk provinsi Gorontalo dikategorikan dalam daftar hitam karena menduduki peringkat paling tidak jujur.

Rapor kejujuran UN untuk sekolah-sekolah di Jatim juga menunjukkan angka yang memprihatinkan. Dikatakan bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jatim, hanya ada tujuh daerah yang memiliki tingkat kejujuran tinggi: Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Batu. Jika dibuat rata-rata tingkat kejujuran tujuh daerah tersebut melebihi 50 persen.

Data rapor kejujuran UN menunjukkan bahwa masih ada 31 kabupaten/kota di Jatim yang berkategori abu-abu alias tidak jujur. Terlepas dari akurasi metodologi yang digunakan, rasanya data Balitbang Kemendiknas tersebut patut menjadi perhatian

pihak-pihak yang berkepentingan dengan kredibilitas penyelenggaraan UN.

Untuk menyongsong penyelenggaraan UN tahun ajaran 2009/2010 rasanya kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dinas pendidikan, dan pemerintah perlu didorong meningkatkan kejujuran. Jika diperlukan, maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil UN, utamanya peserta didik dan sekolah, harus diajak berikrar untuk berperilaku jujur saat mengikuti UN. Berangkat dari penyelenggaraan UN yang kurang kredibel inilah forum rektor yang beranggotakan para rektor perguruan tinggi negeri menolak usulan mengintegrasikan hasil UN dengan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Untuk meningkatkan kejujuran saat mengikuti UN rasanya para peserta didik perlu diberikan semangat dan dorongan yang membesarkan hati (*encouragement*). Hal ini penting karena berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, UN selalu menghadirkan beban bagi peserta didik. Bahkan pimpinan sekolah, guru, orang tua, dan kepala dinas pendidikan pun juga akan merasakan beban yang sama.

Yang lebih aneh, banyak juga kepentingan di luar pendidikan juga turut bertaruh dengan tingkat kelulusan peserta didik. Karena itu tidak mengherankan jika pejabat publik di daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota juga turut khawatir dengan tingkat kelulusan UN. Dalam situasi yang penuh tekanan inilah dorongan dan semangat pada peserta didik, pimpinan sekolah, dan guru, penting diberikan. Mereka harus diyakinkan, bahwa ujian merupakan salah satu bentuk evaluasi eksternal terhadap proses belajar mengajar (PBM). Salah satu tujuan pelaksanaan ujian adalah untuk memetakan mutu pendidikan.

Jika PBM di sekolah sudah sesuai dengan yang diharapkan rasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pelaksanaan UN.

Beban berat yang dirasakan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil UN dalam tingkat tertentu jelas potensial mendorong orang berperilaku tidak jujur. Apalagi pemerintah provinsi Jatim melalui Wakil Gubernur Saifullah Yusuf menargetkan tingkat kelulusan UN harus mencapai 99 persen. Target pejabat publik terhadap kelulusan UN ini biasanya dipahami kepala dinas pendidikan di daerah sebagai perintah untuk menyukseskan UN.

Tentu bukan hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga tingkat kelulusan. Maka, kepala dinas pendidikan pun memerintahkan kepala sekolah untuk menyukseskan UN. Selanjutnya, kepala sekolah memerintahkan pada guru mata-mata pelajaran yang di-UN-kan berusaha keras agar peserta didik lulus UN. Dapat dipahami jika pejabat publik sangat berkepentingan dengan tingkat kelulusan UN. Karena dalam era politik pencitraan ini tingginya angka kelulusan dapat digunakan untuk memperbaiki citra dirinya.

Yang seringkali tidak disadari, bahwa bermula dari tekanan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil akhir UN inilah perilaku tidak jujur di sekolah muncul. Dengan alasan untuk menyukseskan UN, biasanya pihak sekolah pun membentuk tim sukses. Pada saatnya tim sukses inilah yang banyak bermain untuk membantu peserta didik mengerjakan soal-soal UN. Dalam kultur seperti ini dapat dibayangkan kredibilitas penyelenggaraan UN.

Berkaitan dengan problem inilah rasanya kepentingan di luar pendidikan, termasuk kepentingan politik pejabat publik, perlu dikurangi agar sekolah dan peserta didik menjalani

UN dengan tenang dan penuh percaya diri. Para peserta didik perlu diyakinkan bahwa kejujuran itu jauh lebih penting dari sekedar nilai yang diperoleh melalui UN. Bahkan kejujuran akademik ini semestinya bukan hanya dilakukan pada saat UN. Unsur-unsur di sekolah sejak awal seharusnya telah membangun kultur akademik yang jujur. Karena nilai-nilai kejujuran itulah sesungguhnya yang dapat menunjukkan karakter seseorang.

Bukankah pendidikan itu seharusnya diorientasikan untuk mencetak individu-individu yang berkarakter kuat? Dengan bermodal karakter yang kuat ini kita akan melihat *out put* lembaga pendidikan sebagai pribadi-pribadi yang memiliki daya saing tinggi.

DISORIENTASI PENDIDIKAN AGAMA

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah meluncurkan jadwal pelaksanaan ujian nasional (UN) 2012. Yang menarik, selain mata pelajaran UN, BSNP juga menjadwalkan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (USBN PAI) untuk kelas akhir jenjang SMA/SMK, SMP, dan SD. Ini berarti beban peserta didik di sekolah dipastikan semakin bertambah.

Sebagai pemrakarsa, Kementerian agama (Kemenag) beralasan bahwa USBN PAI dimaksudkan untuk mengevaluasi pembelajaran agama Islam di sekolah dengan harapan dapat diketahui daya serap peserta didik sekaligus menjadi rujukan pemetaan mutu. Argumentasi ini terkesan sangat normatif karena kebijakan UN yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) juga didasarkan pada alasan yang sama. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa program USBN PAI sesungguhnya mengekor kebijakan UN.

Kebijakan melaksanakan USBN PAI jelas semakin memperkuat anggapan bahwa pendidikan agama di sekolah baru sebatas sebagai ilmu. Hal ini didukung dengan praktik pembelajaran yang lebih menonjolkan aspek kognitif-hafalan. Peserta didik

kurang mendapat teladan dari unsur-unsur di sekolah mengenai perilaku keagamaan yang baik. Akibatnya, kultur berperilaku religius di sekolah sangat jauh dari yang diharapkan.

Orientasi USBN PAI jelas ingin mengukur capaian belajar peserta didik dalam bentuk hafalan. Ini berarti pendidikan agama di sekolah tidak lagi berorientasi pada amalan atau perilaku. Padahal sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat bermanfaat untuk membangun karakter, pendidikan agama seharusnya lebih menekankan aspek perilaku keagamaan. Melalui pendidikan agama dapat ditumbuhkan afeksi peserta didik seperti rasa ingin tahu, kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, kerja sama, dan kesiapan untuk hidup dalam budaya yang beragam.

Dimensi pendidikan agama yang menekankan pada afeksi peserta didik ini penting menjadi perhatian karena persoalan yang kita dihadapi akhir-akhir ini banyak berkaitan dengan isu hubungan internal dan eksternal antar umat beragama. Ini berarti pembelajaran agama di sekolah akan sangat bermanfaat jika diarahkan untuk membangun komunikasi yang dialogis antar paham dalam satu agama dan antar umat beragama. Dengan demikian, USBN PAI dapat dianggap bertentangan dengan keinginan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pluralitas keagamaan. Di samping itu, kesan eksklusif juga muncul karena di sekolah juga dikembangkan pelajaran agama selain Islam. Pertanyaannya, mengapa hanya PAI yang di-USBN-kan?

Pendidikan agama apa pun sesungguhnya memiliki peran sangat penting dalam memperbaiki perilaku keagamaan seseorang. Keinginan ini akan tercapai jika pendidikan agama tidak sekedar menekankan hafalan, melainkan berorientasi pada perilaku. Yang dibutuhkan saat ini sesungguhnya bukan USBN PAI yang tekanannya pasti dominan pada aspek kognitif. Tantangan guru agama di sekolah adalah menanamkan nilai-nilai kea-

gamaan melalui seluruh proses pembelajaran sehingga peserta didik menjadi orang yang lebih taat dalam beragama.

Jika pendidikan agama berorientasi pada akhlak dan kepribadian, maka untuk menilai capaian peserta didik semestinya dilakukan secara lebih utuh. Untuk itu perlu dilakukan penilaian yang otentik (*authentic assessment*). Prinsip penilaian otentik adalah menilai apa yang seharusnya dinilai. Penilaian otentik juga harus berasal dari banyak sumber. Menilai apa yang seharusnya dinilai berarti penilaian terhadap seluruh aspek; kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Sedang penilaian dari segala sumber jelas tidak hanya mengandalkan informasi peserta didik itu sendiri, melainkan juga teman sebaya, guru, dan orang tua. Mereka ini dapat dilibatkan dalam menilai capaian pendidikan agama peserta didik. Misalnya, orang tua dapat dijadikan informan untuk menilai perilaku anaknya tatkala berada di rumah. Jika orang tua memberikan informasi yang jujur, maka itu dapat dijadikan rujukan sekolah untuk menilai perilaku peserta didik.

Program USBN PAI juga patut dikritisi karena tidak sejalan dengan keinginan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pluralisme. Padahal pluralisme kini menjadi tantangan semua agama dan paham keagamaan. Di antara problem yang dihadapi umat beragama berkaitan dengan pluralisme adalah bahwa setiap agama dituntut melahirkan ajaran yang inklusif dan toleran terhadap keragaman. Sementara pada saat yang bersamaan suatu agama juga diwajibkan untuk meyakinkan pemeluknya bahwa doktrin yang diajarkan memiliki kebenaran mutlak dan bersifat eksklusif.

Dalam menghadapi dilema ini mayoritas tradisi keberagamaan mengambil sikap bahwa kebenaran hanya menjadi

milik mazhab dan agamanya. Mazhab dan agama yang lain dianggap salah. Akibatnya, setiap penganut agama atau paham keagamaan tertentu mengklaim ajarannya bersifat eksklusif dan paling benar. Klaim kebenaran (*truth claim*) inilah yang menyebabkan tidak adanya keinginan untuk saling memahami suatu tradisi keberagamaan.

Pada konteks inilah perlu dikembangkan kesadaran bahwa pluralitas keagamaan merupakan keniscayaan. Ini berarti dibutuhkan kesiapan setiap individu untuk hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama dan paham keagamaan dengan dirinya. Apalagi dalam Islam juga muncul begitu banyak mazhab di bidang fikih, teologi, dan politik. Bahkan untuk bidang fikih, perbedaan pendapat antar mazhab terasa sangat sensitif. Pertanyaannya, mampukah kebijakan USBN PAI mengakomodasi begitu banyak aliran pemikiran dan mazhab dalam Islam?

Pendidikan agama di sekolah juga harus berorientasi pada penanaman nilai-nilai religiusitas. Orientasi ini perlu ditekankan karena lembaga pendidikan mulai jenjang dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi kini menghadapi persoalan kenakalan remaja. Potret buram lembaga pendidikan yang diwarnai kasus tawuran, narkoba, *human trafficking*, dan keterlibatan pelajar dalam kasus-kasus pidana, seharusnya lebih diprioritaskan untuk dicarikan solusinya.

Karena itu, layak dipertanyakan relevansi USBN PAI dalam kaitannya dengan tantangan pluralitas agama atau paham keagamaan dan kenakalan remaja. Jika kebijakan USBN PAI terus dipaksakan maka itu jelas merupakan kegagalan dalam memahami orientasi pendidikan agama.

PENDIDIKAN HOLISTIK

Menurut diktum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan.

Pengertian tersebut memberikan gambaran betapa pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi anak. Itu berarti tugas pendidik adalah memfasilitasi anak-anak agar mengenali potensi yang dimiliki. Dalam hal ini anak harus diajari mengenali kemampuan diri sendiri (*self awareness*) sehingga menyadari kekuatan dan kelemahannya. Dengan mengenali potensinya maka seorang anak dapat didorong untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahannya.

Harus diyakini, bahwa setiap anak pasti memiliki potensi istimewa yang telah dianugerahkan Tuhan. Karena itu, sesungguhnya tidak boleh ada kategori anak “bodoh” atau “nakal”. Setiap anak pasti memiliki kecerdasan yang sangat unik dan bervariasi. Pada konteks inilah pendidik dan pe-

serta didik harus berkomunikasi secara timbal balik agar dapat menemukan potensi diri yang akan dikembangkan. Yang penting diingat, bahwa potensi diri itu tidak harus bersifat akademik, melainkan juga non-akademik.

Secara jujur harus diakui bahwa budaya masyarakat masih menempatkan capaian akademik di atas prestasi non-akademik. Pemerintah dalam berbagai kebijakan juga turut menyuburkan pola pikir tersebut. Itu dapat diamati dari perhatian pemerintah yang luar biasa setiap ada ujian nasional (UN). Mungkin tidak ada satu pun negara di dunia ini yang memberikan perhatian terhadap UN melebihi negara kita. Bahkan untuk membuat pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil UN berperilaku jujur saja, pemerintah harus mengerahkan sumber daya sipil dan militer. Itu belum termasuk anggaran ratusan milyar rupiah yang harus dialokasikan untuk kepentingan UN.

Dalam perspektif pendidikan, UN jelas merepresentasikan keinginan mengukur capaian akademik dan mengabaikan prestasi non-akademik. Kebijakan ini jelas kurang bersahabat pada peserta didik yang memiliki bakat luar biasa di bidang non-akademik, seperti olahraga dan kesenian. Rasanya sudah saatnya kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberikan penghargaan secara proporsional terhadap prestasi akademik dan non-akademik.

Capaian akademik dan non-akademik jelas sama-sama dibutuhkan untuk sukses hidup. Peserta didik yang memiliki keunggulan akademik berpeluang besar menjadi ilmuwan dan peraih hadiah nobel di bidang sains dan matematika. Tetapi, prestasi non-akademik juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebab, peserta didik yang memiliki keunggulan di bidang non-akademik juga berpeluang menjadi orang yang sukses di bidangnya.

Itu berarti profesi ilmuwan sama terhormatnya dengan atlet, pekerja seni, dan enterpreneur. Karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa Profesor B. J. Habibie (ilmuwan), Rudi Hartono (olahragawan), Emha Ainun Najib (pekerja seni), dan Insinyur Ciputra (pengusaha dan pengembang virus enterpreneur) merupakan contoh orang-orang hebat di bidangnya. Tidak bisa dikatakan salah satu lebih baik dari pada yang lain.

Untuk melahirkan olahragawan, seniman, dan enterpreneur andal jelas diperlukan langkah strategis. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan sekolah unggul di bidang olahraga, kesenian, dan enterpreneur. Hanya saja harus diakui bahwa minat masyarakat terhadap sekolah jenis ini masih langka. Karena itu perlu dilakukan sosialisasi secara intensif sehingga dapat membantu untuk mendongkrak minat masyarakat. Dalam kaitan ini pemerintah perlu mengambil peran untuk membantu sekolah yang memproduksi atlet dan pekerja seni. Jumlah lembaga pendidikan yang mencetak enterpreneur juga harus diperbanyak. Apalagi realitas menunjukkan bahwa jumlah kelas enterpreneur tergolong masih sangat kecil, belum menembus angka dua persen.

Banyak persoalan yang juga masih membutuhkan penanganan agar terjadi percepatan mutu pendidikan nasional. Salah satunya adalah penerapan sistem pendidikan dua atap (Kemendikbud-Kemenag dan umum-agama). Polarisasi ini dalam tingkat tertentu pasti akan menyuburkan pola pikir yang parsial. Tidak ada budaya untuk saling bertegur sapa antar disiplin ilmu. Akibatnya, lulusan satuan pendidikan pun hanya menguasai bidang yang ditekuni. Jika ini terus dipertahankan, maka keinginan untuk mengembangkan kajian yang interkoneksi (*interconnected studies*) pasti tidak akan terwujud.

Ukuran capaian pendidikan yang hanya menekankan aspek

kognitif-hafalan, seperti halnya kebijakan UN, rasanya juga harus segera dievaluasi. Bukankah pemerintah selalu menggelorakan wacana mengenai pentingnya pendidikan berkarakter. Pertanyaannya, apa relevansi pendidikan berkarakter dengan UN? Kalau mau dikatakan secara jujur, UN sejauh ini hanya memicu praktik ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*).

Sudah seharusnya pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenag saling bertegur sapa untuk merumuskan formula agar sistem pendidikan tidak lagi terpola menjadi dua atap. Pemerintah juga harus segera mengakhiri penentuan kelulusan peserta didik dengan hanya menekankan pada capaian akademik. Rasanya sudah cukup banyak korban berjatuhan akibat tidak tahan tekanan saat menghadapi ujian.

Pemerintah juga harus mengubah kebijakan untuk mewujudkan pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik dalam hal ini dapat dipahami sebagai pendidikan yang menggabungkan semua potensi; intelektual, emosional, spiritual, sosial, kultural, dan fisik. Melalui pendidikan holistik diharapkan akan terwujud pendidikan manusia seutuhnya (*humanistic education*). Ini jelas sejalan dengan tujuan sistem pendidikan nasional. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut jelas dibutuhkan terobosan dan keberanian.

MENGEMBALIKAN MAKNA PENDIDIKAN

Pendidikan menurut Undang-undang 20/ 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Perspektif ini penting dikemukakan agar kita dapat mengembalikan makna pendidikan, yakni membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu menghadapi problem masa depan. Memahami makna pendidikan dengan perspektif ini penting karena ada kalanya peserta didik merasa tidak memperoleh manfaat apa pun dari proses pembelajaran. Lulusan satuan pendidikan pun merasa ada kesenjangan antara ilmu yang dipelajari dengan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan.

Kesenjangan proses pembelajaran dan tantangan dalam kehidupan semakin kelihatan tatkala peserta didik dinyatakan lulus. Bagi yang memiliki kecukupan dana, mereka dapat

melanjutkan pendidikan. Sementara bagi yang tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak ada pilihan lain kecuali harus bekerja. Dalam situasi ini kita seringkali menjumpai ada banyak lulusan yang gagal memperoleh pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan. Situasi yang kurang lebih sama juga dihadapi lulusan perguruan tinggi. Mereka juga merasakan, ternyata ilmu yang diajarkan di bangku kuliah banyak yang tidak kompatibel dengan kebutuhan masyarakat. Mereka pun mengalami kesulitan untuk mempraktikkan ilmunya. Pada konteks inilah lembaga pendidikan patut dikritik karena hanya memproduksi kelompok pengangguran dari kalangan terdidik.

Lembaga pendidikan juga layak disorot karena belum mampu melahirkan lulusan yang terampil. Akibatnya mereka kurang siap berkompetisi untuk memperebutkan peluang yang ada. Data Badan Pusat Statistika (BPS) edisi Mei 2010 melaporkan bahwa angka pengangguran mencapai 8,59 juta orang (7,41 persen) dari 116 juta angkatan kerja. Ironinya, angka pengangguran dari lulusan perguruan tinggi mencapai 1,36 juta (15,84 persen). Ini berarti banyak lulusan perguruan tinggi yang belum terserap di dunia kerja. Bahkan mereka juga harus bersaing dengan tenaga asing.

Karenanya tidak mengherankan jika lembaga *International Management Development* (IMD) menempatkan tingkat daya saing angkatan kerja Indonesia pada peringkat 35 dari 58 negara. Tingginya pengangguran dari kalangan terdidik jelas sangat memprihatinkan. Sebab, pengangguran terdidik jauh lebih berbahaya dibanding pengangguran yang tidak berpendidikan. Munculnya pengangguran terdidik disebabkan tidak disiapkan dengan baik untuk menghadapi dunia kerja. Akibatnya lulusan satuan pendidikan pun tidak memiliki keterampilan saat lulus.

Sistem pendidikan kita juga dituding kurang berhasil mendidik pribadi yang berkarakter. Pada konteks inilah kita perlu mengembalikan makna pendidikan agar melahirkan pribadi yang siap menghadapi tantangan kehidupan.

Untuk itulah seorang pendidik harus mengajarkan sesuatu yang benar-benar baru (*something new*). Jika ini dilakukan berarti pendidik telah mengajarkan sesuatu yang sangat dibutuhkan peserta didik. Berkaitan dengan itu penting direnungkan ungkapan yang terkenal dalam falsafah pendidikan klasik berbunyi; *non scholae sed vitae discimus* (kita belajar bukan sekedar untuk sekolah, melainkan untuk hidup). Ini berarti pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan peserta didik tatkala berada di bangku sekolah. Yang jauh lebih penting adalah menyiapkan mereka sehingga memiliki kecakapan yang dibutuhkan untuk menghadapi persoalan dalam kehidupan.

Karena itulah pendidikan seharusnya tidak direduksi hanya sekedar transformasi ilmu lalu dilakukan pengetesan (*teaching for the test*), seperti yang tampak dalam kebijakan mengenai ujian nasional (UN). Sebab, jika ini yang terjadi maka sekolah hanya akan menjalankan fungsi layaknya lembaga bimbingan belajar. Akibatnya proses pembelajaran akan berorientasi pada aspek yang berkaitan dengan pemahaman-kognitif. Tujuan jangka pendeknya jelas, peserta didik berhasil lulus dengan nilai memuaskan. Persoalan cara memperoleh nilai tidak lagi menjadi perhatian. Dalam situasi ini lembaga pendidikan pasti hanya akan melahirkan pribadi yang tidak jujur alias curang. Pelaksanaan UN dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kebijakan ini sejatinya tidak sejalan dengan keinginan untuk melahirkan pribadi-pribadi yang berkarakter.

Sejak 2011 mekanisme penentuan kelulusan memang telah diubah formatnya menjadi 60 persen UN dan 40

persen ujian sekolah. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan agar sekolah dilibatkan dalam menentukan kelulusan. Di samping itu juga dilakukan kebijakan untuk membuat variasi soal UN dalam lima paket. Beberapa ikhtiar ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelulusan sekaligus mengurangi kasus ketidakjujuran (*dishonesty*). Perubahan mekanisme ini memang terbukti bisa meningkatkan kelulusan hampir 99 persen.

Tetapi, berdasarkan pengalaman ternyata masih banyak ditemukan kecurangan. Ironinya, kecurangan ini melibatkan peserta didik, guru, kepala sekolah, dan mentor di lembaga bimbingan belajar. Sangat mungkin perilaku curang itu diakibatkan rasa cemas peserta didik saat menghadapi UN. Hasil uji petik psikologis menunjukkan 79,1 persen peserta didik sekolah menengah atas mengalami kecemasan yang luar biasa (*Kompas*, 14 Mei 2012).

Yang lebih menyedihkan, mulai 2012, pemerintah juga melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam (USBN PAI). Kebijakan ini dikatakan telah menjadi kesepahaman Kementerian Agama (Kemendikbud) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sasaran USBN PAI adalah peserta didik kelas akhir SD, SMP, dan SMA/SMK. Pelaksanaan USBN PAI semakin memperkuat anggapan bahwa pembelajaran agama di sekolah baru sebatas ilmu. Model evaluasinya pun didasarkan pada pemahaman-hafalan. Karena itu jangan heran jika yang ditekankan pendidik dalam pembelajaran agama lebih dominan pada aspek kognitif. Peserta didik kurang mendapatkan keteladanan dalam berperilaku yang baik di sekolah.

Terkait dengan kebijakan USBN PAI, Muhammadiyah telah mengambil sikap tegas. Muhammadiyah menolak kebijakan USBN PAI dengan alasan tidak terlalu urgen untuk

dilakukan. Masih banyak persoalan di lingkungan pendidikan yang membutuhkan perhatian seperti kenakalan remaja, *human trafficking*, narkoba, dan keterlibatan unsur-unsur di sekolah dalam tindak pidana. Semestinya pembelajaran agama di sekolah lebih diarahkan untuk mewujudkan perilaku yang lebih religius dari pada sekedar capaian nilai.

Bagi Muhammadiyah, pelaksanaan USBN PAI juga dianggap bertentangan dengan semangat untuk menghargai keragaman paham keagamaan dalam Islam. Apalagi sejauh ini Muhammadiyah telah mengembangkan kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyah (Ismu), yang sangat mungkin berbeda dengan paham keagamaan yang dikembangkan sekolah-sekolah non- Muhammadiyah.

Karena persoalan yang terjadi di dunia pendidikan begitu kompleks, maka dibutuhkan keberanian untuk melakukan reformasi. Otoritas reformasi pendidikan itu jelas ada di tangan Kemendikbud dan Kemenag. Sudah saatnya dua institusi ini mengembalikan makna pendidikan sesuai amanah konstitusi. Yang harus diingat, lembaga pendidikan bukan sekedar pabrik ijazah (*diploma mills*), melainkan tempat berproses bagi peserta didik untuk memaknai seluruh pengalaman hidup.

MEREFORMASI PENDIDIKAN

Banyak pihak berharap reformasi pendidikan akan mulai dicanangkan ketika Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di bawah kendali Prof. Dr. Muhammad Nuh (Pak Nuh). Harapan ini tentu tidak berlebihan mengingat *track record* yang sangat mentereng dan didukung jiwa reformis Pak Nuh, baik ketika menjadi Rektor ITS maupun Menkominfo. Sebagai mantan pimpinan salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, Pak Nuh tentu sudah sangat memahami seluk beluk mengelola pendidikan yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Karena itu, ketika Pak Nuh dipilih menjadi Mendiknas dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, hampir tidak ada perdebatan di kalangan praktisi dan pemerhati pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa figur Pak Nuh dianggap sangat layak dan dapat diterima komunitas pendidikan di negeri ini.

Tetapi, jujur harus diakui bahwa harapan banyak pihak agar terjadi reformasi bidang pendidikan ini tampaknya baru sebatas impian. Sebab, dalam prioritas program 100 hari menjabat Mendiknas, Pak Nuh telah melontarkan beberapa gagasan yang kontroversial. Misalnya, keinginan Pak Nuh untuk mengintegrasikan nilai Ujian Nasional (UN) dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).

Sekilas gagasan ini memang baik karena bertujuan mengefektifkan cara masuk perguruan tinggi. Tetapi, Pak Nuh harus menghadapi penolakan para rektor PTN yang tergabung dalam forum rektor. Para rektor PTN belum dapat menjalankan program integrasi nilai UN sebagai tiket memasuki pendidikan tinggi. Alasan penolakan para rektor jelas berkaitan dengan integritas hasil UN. Menurut para rektor, jika UN belum dilaksanakan secara jujur, maka hasilnya pun layak diragukan.

Ini berarti sesungguhnya kalangan perguruan tinggi pun sudah sangat memahami praktik ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) dalam penyelenggaraan UN. Maka, hasil UN pun belum dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur kualitas peserta didik. Pertanyaannya, jika PTN sebagai mitra pemerintah saja meragukan kejujuran pelaksanaan UN, maka untuk apa program ini tetap dilanjutkan?

Persoalan UN memang telah menjadi salah satu atensi Pak Nuh. Dalam banyak kesempatan Pak Nuh juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan UN dengan sejumlah perbaikan dalam penyelenggaraannya. Bahkan ketika Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan agar pemerintah melakukan regulasi ulang penyelenggaraan UN, Pak Nuh tetap bersikukuh menyelenggarakan UN. Pak Nuh dan jajarannya bersikukuh bahwa MA tidak melarang pelaksanaan UN. Pandangan ini sekilas memang benar, tetapi sesungguhnya kalau mau jujur, publik pun dapat menyatakan bahwa dalam amar keputusan tersebut MA juga tidak mewajibkan penyelenggaraan UN.

Maka, pertanyaannya adalah mengapa pemerintah masih gigih menyelenggarakan UN jika kenyataannya tidak pernah dijalankan secara jujur dan berkeadilan? Jika dikata-

kan bahwa pada tahun ini UN tetap diselenggarakan karena telah diputuskan dalam APBN 2010, maka beranikah Pak Nuh meninjau kembali penyelenggaraan UN untuk tahun-tahun berikutnya? Beberapa pertanyaan ini layak dijawab karena belum ada teori yang dapat menjelaskan keterkaitan UN dengan pembentukan karakter bangsa. Bukankah yang terpenting dari diselenggarakannya pendidikan adalah untuk membentuk karakter bangsa?

Sebagian masyarakat sesungguhnya ada yang beranggapan bahwa UN tetap penting sebagai bagian dari sistem pendidikan. Menurut pandangan ini, UN dapat digunakan untuk menilai atau mengaudit secara eksternal penyelenggaraan proses pembelajaran oleh satuan pendidikan. Yang dipersoalkan adalah ketika UN dijadikan sebagai standar kelulusan peserta didik. Dalam menanggapi persoalan ini pemerintah biasanya berdalih bahwa UN bukan satu-satunya standar kelulusan.

Seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 17 ayat 1, dikatakan bahwa ada empat persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik untuk dinyatakan lulus. Empat persyaratan yang dimaksud adalah (1) menyelesaikan seluruh program; (2) memperoleh minimal nilai baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan; (3) lulus ujian sekolah; dan (4) lulus ujian nasional.

Alasan normatif pemerintah dengan berdasar pada peraturan pemerintah tersebut memang dapat dibenarkan. Tetapi, sejukurnya dengan ketentuan nilai minimal untuk mata-mata pelajaran yang di-UN-kan, maka sekolah mulai menunjukkan gelagat tidak jujur. Buktinya, hampir tidak pernah ada kejadi-

an dimana peserta didik yang dinyatakan lulus UN kemudian diputuskan tidak lulus gara-gara tidak memenuhi tiga kriteria kelulusan yang lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa UN tetap menjadi segala-galanya. Maka, UN pun menjadi hantu yang menakutkan bagi peserta didik, guru, dan orang tua.

Anehnya, kelompok berkepentingan di luar lembaga pendidikan pun terkadang turut bermain sehingga menyebabkan praktik ketidakjujuran UN semakin meningkat. Misalnya, kelulusan UN seringkali dijadikan kepentingan politik oleh kepala daerah. Bahkan kepala daerah memberi target pada kepala dinas pendidikan untuk menyelesaikan UN.

Indikator kesuksesan UN bagi kepala daerah adalah tingginya angka kelulusan. Akibatnya, kepala dinas pendidikan pun mewajibkan pada sekolah untuk juga menyelesaikan UN. Tekanan kepala daerah dan kepala dinas pendidikan ini pun ditanggapi pihak sekolah dengan membentuk tim sukses UN. Berawal dari sini praktik ketidakjujuran penyelenggaraan UN terjadi. Semua pihak menjadi turut berkepentingan menyelesaikan UN tentu dengan segala cara.

Berkaitan dengan budaya tidak jujur tersebut jelas dibutuhkan terobosan dari Pak Nuh untuk mereformasi penyelenggaraan UN dengan beberapa langkah. *Pertama*, melibatkan lebih banyak pihak mulai sekolah, kepala daerah, perguruan tinggi, kepolisian, dan NGO, untuk mengawal penyelenggaraan UN agar berlangsung lebih jujur.

Kedua, memberikan pembobotan yang jelas dari empat komponen yang dijadikan penentuan kelulusan peserta didik seperti tertuang dalam peraturan pemerintah. Pemberian bobot ini juga terasa lebih adil karena ada perhitungan kuantitatif yang meliputi komponen-komponen yang dijadikan standar kelulusan. Jadi, kelulusan peserta didik tidak hanya ditentukan dalam beberapa hari penyelenggaraan UN.

Ketiga, bahwa orientasi ujian dalam UN semestinya bukan hanya peserta didik, melainkan juga satuan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar mengajar. Mekanisme ini salah satunya menuntut agar standar nilai minimal kelulusan harus dihapuskan. Ini berarti semua anak yang ikut ujian sepanjang terpenuhi syarat normatif dari empat komponen yang ditetapkan dapat dipastikan lulus. Yang membedakan adalah tingkatan (*grade*) lulusan dan mutu satuan pendidikan. Jika ini yang dijalankan maka baru benar pernyataan yang mengatakan bahwa UN berkaitan dengan pemetaan mutu pendidikan. Tugas selanjutnya pemerintah adalah membina sekolah yang memiliki mutu rendah berdasarkan pelaksanaan hasil ujian.

Terus terang, untuk melakukan reformasi pendidikan dibutuhkan keberanian. Pertimbangan-pertimbangan di luar pendidikan pun seharusnya diabaikan. Sebab, selama ini publik terlanjur memahami bahwa hambatan utama para Mendiknas terdahulu untuk meregulasi pelaksanaan UN berkaitan dengan begitu banyak kepentingan di luar pendidikan. Misalnya, kepentingan proyek yang melibatkan uang milyaran rupiah dan kepentingan politik kekuasaan. Maka, dalam konteks ini diperlukan figur yang *powerful* dan tidak ABS (Asal Bapak Senang).

Semoga Pak Nuh dapat merealisasikan harapan begitu banyak orang yang menginginkan agar pendidikan dikelola dengan cara yang profesional, berkeadilan, dan bermartabat. Bukankah Pak Nuh diminta Pak SBY untuk membantu mewujudkan pendidikan yang berkarakter?

PUASA MENGAJARKAN OPTIMISME

Salah satu pelajaran berharga yang kita peroleh selama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan adalah hendaknya setiap pribadi bersikap optimis. Pelajaran tentang optimisme ini didasarkan pada keyakinan bahwa orang yang berpuasa pasti akan memperoleh kebahagiaan meski terlebih dulu harus menahan lapar dan dahaga serta perbuatan lain yang dapat merusak ibadah puasa. Penderitaan ini hanya sementara karena begitu Maghrib datang, kita pun diperkenankan berbuka. Umat Islam akan bertambah bahagia tatkala merayakan hari raya Idul Fitri.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda; orang yang berpuasa itu memiliki dua macam kebahagiaan, yakni ketika datang waktu berbuka dan saat bertemu dengan Allah. Hadits ini memberikan pelajaran bahwa setelah mengalami penderitaan dengan menahan lapar, dahaga, dan nafsu, kita dijanjikan kenikmatan. Ini berarti puasa mengajarkan kita untuk membangun harapan, cita-cita, dan obsesi hidup baik ketika di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan yang paling hakiki akan dirasakan orang yang berpuasa pada saat bertemu dengan Allah. Pada saat itu kita dijanjikan akan masuk surga yang penuh kenikmatan melalui pintu yang disebut *al-rayyan* (HR. Bukhari).

Jika ditanyakan pada orang yang berpuasa; kenapa tidak makan, minum, dan “berkumpul” dengan suami atau istri pada siang hari bulan Ramadan padahal semua itu halal? Jawabnya adalah karena kita sepenuhnya percaya bahwa Allah Maha Melihat seluruh yang dilakukan makhluk-Nya. Kesadaran bahwa Allah Maha Melihat ini sangat fundamental. Karena bermula dari kesadaran inilah kita merasa begitu dekat dengan Allah. Kondisi ini dalam tradisi sufi disebut *muraqabah*.

Rasanya, salah satu pengalaman terpenting dan begitu mendalam yang diperoleh orang yang berpuasa adalah merasa dekat dengan Allah. Inilah sesungguhnya yang dinamakan dengan takwa sebagaimana yang menjadi tujuan puasa (QS. al-Baqarah: 183). Keinginan kuat orang yang berpuasa untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak ibadahnya jelas didasarkan pada tujuan memperoleh keridlaan Allah. Bagi mukmin sejati, keridlaan Allah jelas lebih penting dari segala sesuatu.

Jika diamati, perbedaan mukmin dan non-mukmin salah satunya dapat dilihat dari sudut pandang mereka terhadap kehidupan. Bagi orang-orang yang beriman, kehidupan di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Dunia ini hanyalah lahan untuk beribadah. Kehidupan yang abadi justru di akhirat kelak. Karena itu, orang-orang beriman selalu terdorong untuk melakukan yang terbaik ketika hidup di dunia sebagai bekal kembali kepada Allah.

Sementara orang-orang yang tidak beriman selalu menyatakan bahwa dunia adalah akhir dari kehidupan. Bagi mereka, tidak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Mereka pun tidak mengenal ajaran berinvestasi amal untuk kehidupan di akhirat. Tegasnya, mereka tidak memiliki harapan apa pun terhadap kehidupan pasca di dunia ini.

Dalam kaitan dengan ibadah puasa berarti orang yang beriman tidak boleh merasa menderita hanya karena menahan lapar, dahaga, dan nafsu seks. Sebab, Allah telah menjanjikan pahala yang besar bagi kita. Sekali lagi, inilah tampaknya yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Allah berfirman; *Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana* (QS. al-Nisa': 104). Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hubungan mukmin dan non-mukmin, kita sesungguhnya memiliki kelebihan. Meski mungkin sama-sama menderita, kita memiliki harapan kepada Allah, sedangkan mereka tidak.

Melalui ibadah puasa kita dilatih untuk memiliki harapan. Karena itu kita harus senantiasa optimis menjalani hidup. Kita pun dilarang mudah berputus asa dalam mencari rahmat Allah (QS. Yusuf: 87). Apalagi jika sifat putus asa itu disebabkan oleh penderitaan yang dialami pada saat berpuasa. Sebab, derita yang dirasakan orang yang berpuasa hanya bersifat sementara karena ada saatnya untuk berbuka. Kaum beriman harus selalu memiliki energi untuk menghadapi segala bentuk tantangan. Semoja melalui ibadah puasa kita dapat menjadi pribadi yang terlatih membangun optimisme guna meraih kehidupan yang lebih baik. Meski untuk itu kita harus melalui proses jatuh bangun.